

SEJARAH BERDIRINYA PERGUNU 1952-1965

Iftikha Saraswati¹, Aris Adi Leksono², M. F. Hidayatullah³, Eko Satriya Hermawan⁴, Achmad Zuhri⁵

¹ Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

² Bidang Pendidikan, Komisi Perlindungan Anak Indonesia Republik Indonesia, Jakarta

³ Departemen Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember

⁴ Prodi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya

⁵ Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Penulis Korespondensi: Iftikha Saraswati

Email: iftikhasaraswati@mhs.ugm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang berdirinya Persatuan Guru Nahdlatul Ulama' (PERGUNU) yang menaungi guru-guru di lingkungan Nahdlatul Ulama. PERGUNU yang didirikan di Surabaya tahun 1958, dari rekomendasi Kongres Ma'arif tahun 1952. Mengingat PERGUNU pernah jaya dimasa itu, hal tersebut akan menjadi acuan, pelumas, motivasi teruntuk kepemimpinan PERGUNU masa kini. Bagaimana PERGUNU memberikan warna dalam organisasi guru di Indonesia. Menggunakan metode sejarah, maka penulis berupaya menganalisis Pertumbuhan awal PERGUNU masa kepemimpinan Soekarno, penyebab munculnya PERGUNU serta kontribusinya kepada politik Pendidikan di Indonesia dan juga dinamika di dalam Organisasi PERGUNU. Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari berbagai arsip nasional, surat kabar terbit pada tahun 1960-an, buku, jurnal. Yang kemudian penulis analisis, menyatakan bahwa, PERGUNU dibentuk sebab dinamika Politik Pendidikan di Indonesia. Sebab guru-guru NU yang bernaung dalam PGRI (Persatuan Guru Republik Indonesia) merasa kecewa akibat perbedaan ideologi yang ada dalam tubuh PGRI. Mengingat banyaknya guru yang berada di lingkungan NU, maka dalam Kongres Ma'arif merekomendasikan adanya organisasi guru milik NU yang dapat mewadahi guru-guru NU, maka, dibentuklah PERGUNU. Perannya selama masa orde lama, ikut memperjuangkan NKRI serta mampu melakukan pemekaran di beberapa daerah.

Kata kunci: Organisasi Guru, PERGUNU, Orde Lama, guru.

PENDAHULUAN

Masa orde lama memberikan kebijakan kebebasan berkumpul dan berbicara di depan umum, dalam situasi bebas. Sebab dimasa 1945-1950 dalam periode pengaturan hukum hak asasi manusia. Mengingat pada periode ini masih dalam masa kemerdekaan, sehingga masa ini, masih dalam proses penyusunan aturan dan pondasi secara hukum dan politik. Pada tanggal 1 November 1945 dibuatlah maklumat pemerintah tentang hak berserikat. Berlanjut pada tanggal 3 November 1945 dibuatlah maklumat pemerintah yang mengizinkan tiap masyarakat untuk membentuk partai politik, Lembaga Swadaya Masyarakat atau organisasi masyarakat sipil di luar pemerintah lainnya. Tahun 1950-1959

merupakan masa bulan madu dari hak asasi manusia, dikarenakan dimasa itu, telah tercapai 5 aspek yang dapat dikatakan tercapai dalam hal pemenuhan kebebasan berserikat, diantaranya, (1) Banyak partai politik yang tumbuh dengan bermacam ideologi, (2) Pers memiliki kebebasan, (3) Pemilu sebagai pilar penting dalam penentuan pendapat berjalan dengan adil, demokratis, dan bebas, (4) Wakil rakyat benar-benar melakukan kontrol yang efektif terhadap eksekutif, (5) Wacana dan ide mengenai kebebasan mendapat iklim yang kondusif. (Admin Pusat Layanan Universitas Stekom Pusat., n.d.)

Tak terkecuali organisasi profesi guru. Dimasa orde lama, banyak sekali organisasi guru yang lahir dan bermunculan baik tingkat nasional maupun daerah ataupun organisasi guru khusus sub tertentu. Ada berbagai factor berdirinya organisasi guru di masa orde lama.

Penelitian ini adalah penelitian sejarah organisasi/ perserikatan profesi, di bidang pendidikan khususnya guru. Yang meneliti bagaimana semangat sebuah zaman memengaruhi seseorang dalam bertindak, berkumpul dan berkarya. Dalam hal ini, juga sangat penting untuk menempatkan sebuah perserikatan sebagai representasi dari sebuah zaman. Oleh karena itu, kerangka ini akan menyusun mengenai sejarah kebebasan berserikat ini diletakkan untuk meneliti PERGUNU pada eksistensinya di masa demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal. Justifikasi keberadaan PERGUNU sebagai sumber sejarah, mengenai konsep untuk memakai data arsip melalui metode sejarah dengan pendekatan struktural untuk menemukan fakta historis dari kiprah PERGUNU.

Sejarah perserikatan/organisasi adalah bidang kajian sejarah yang mengkaji mengenai ide, pikiran, nilai-nilai, semangat, etos, orientasi, koordinasi, organisir, kiprah/eksistensi, dan jiwa zaman dari sebuah kelompok, dengan kata lain sebuah kolektif. Sejarah organisasi adalah usaha untuk menjelaskan proses sejarah mulai dari factor penyebab bersatunya individu-individu untuk mencapai kesepakatan dan membuat sebuah gerakan dan tujuan-tujuan yang terorganisir.

Perhatian sejarawan terhadap historiografi organisasi-pendidikan terutama organisasi guru terkhusus 'PERGUNU' tidak banyak, apabila dibandingkan dengan sejarah politik, ekonomi dan sebagainya. Sejarah organisai guru salah satunya PERGUNU merupakan tema yang sering terlupakan, padahal organisasi ini telah ada sejak tahun 1953, meskipun pernah surut pada masa pemerintahan orde baru. Namun di saat ini kegairahan untuk menulis sejarah organisai guru yang merupakan bagian sejarah "kecil" mulai muncul. Meskipun sudah ada beberapa penulisan tentang organisasi guru namun masih dapat terhitung, padahal organisasi guru di Indonesia sudah ratusan jumlahnya sejak awal periode reformasi.

Kajian guru dalam perspektif organisasi dilakukan oleh Sanjaya tentang Perserikatan Guru Hindia Belanda (PGHB) 1912-1919. Dalam literasi tersebut, Sanjaya membahas mengenai pergerakan guru untuk mendapatkan keadilan dan kesejahteraan, dari Pemerintahan Hindia Belanda.

Pada Penelitian ini akan membahas mengenai kelahiran Organisasi Guru Nahdlatul Ulama' yang disebut Persatuan Guru Nahdlatul Ulama' (PERGUNU). Apa yang membuat organisasi ini didirikan, seperti apakah eksistensi Organisasi PERGUNU, sebanyak apa pemekaran PERGUNU di berbagai daerah serta dinamikanya.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah historis atau metode sejarah. Sebab topik yang diteliti oleh penulis adalah cerita masa lalu, dapat ditentukan bahwa metode terbaik untuk mengupas sejarah adalah dengan metode historiografi. Ernest Bernheim dalam Kuntowijoyo menjelaskan bahwa Penelitian historiografi memiliki 4 tahapan pokok yang harus dipraktikkan yaitu heuristik, kritik sumber, interpretasi dan historiografi.

Sumber primer dalam penelitian ini diperoleh dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka dan di Salemba, berupa koran dan majalah sezaman, juga di Kementerian Agama, Kantor Pusat PGRI, Arsip Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, Perpustakaan AWS, Perpustakaan Medayu Agung, Perpustakaan dan Arsip Provinsi Jawa Timur.

Sumber primer lainnya yang peneliti dapatkan mengenai kiprah PERGUNU, diantaranya, koran-koran sezaman tentunya, seperti Harian Duta Masyarakat yang dimasa itu menjadi surat kabar “corong NU”, dimana koran tersebut sering memuat kegiatan-kegiatan PERGUNU se- Indonesia dimasa orde lama.

Surat kabar *online*, juga akan dimanfaatkan untuk mendapatkan sumber-sumber primer terkait. Selanjutnya, baik sumber sekunder maupun tersier akan penulis gunakan untuk memperkaya data dan wacana terkait permasalahan kajian yang akan didapatkan dari penelusuran buku dan artikel *online*.

Kemudian, berdasarkan sumber yang diperoleh, peneliti akan mengkritisnya dan memilah sumber-sumber yang kredible, akurat, guna mendapatkan analisis yang tepat. Pada tahap selanjutnya, dari sumber yang telah dikritisi kemudian diinterpretasikan dan dinarasikan menjadi rangkaian sebuah hasil kajian sejarah. Penelitian ini dilakukan sejak tahun 2020 hingga pertengahan tahun 2023.

PEMBAHASAN

A. Situasi Politik Pendidikan di Indonesia 1950-1966

Salah satunya PGRI yang didirikan di Semarang pada 25 November 1945 yang dulunya Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) didirikan tahun 1912. PGRI merupakan organisasi tertua di Indonesia dan memiliki basis masa yang cukup besar. Namun karena rivalitas ideologi di dalam organisasi PGRI, terpecah menjadi PGRI Vaksentral dan Nonvaksentral.

Berawal dari Kongres ke VII Organisasi Guru PGRI, pengaruh PKI mulai masuk kedalam tubuh PGRI, ditandai dengan terpilihnya Soebandri sebagai redaksi suara majalah Suara Guru pada tahun 1952. Pengaruh PKI pada saat ini masih belum terlalu terasa dikarenakan masih dalam skala kecil dan belum bisa memecah suara anggota PB PGRI. Jumlah anggota PGRI sendiri yang mendukung terhadap PKI di Jawa Barat hanya berkisar 573 orang dari 80.000 anggota. Di Jawa Tengah dan Jawa Timur memiliki jumlah anggota lebih dari 2000 orang yang mendukung PKI. (Hadiatmadja, R.A. Soepardi, 2000) Pada Kongres VII PGRI Hermanoe Adi yang merupakan tokoh PKI dari Jawa Timur berhasil terpilih menjadi Wakil Ketua II PB PGRI, kesempatan ini dimanfaatkan untuk

merekrut anggota-anggota PKI, terutama yang berada di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur untuk masuk menjadi anggota PGRI. (Rusli Yunus, 2003a)

Meningkatnya anggota yang berafiliasi ke PKI membuat golongan anti PKI merasa risau, sehingga dengan melihat keadaan ini para guru-guru yang kecewa anti PKI membuat organisasi non PGRI seperti Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU), Ikatan Guru Muhammadiyah (IGM), Persatuan Guru Kristen (PERGUKRI) demi keluar dari pengaruh komunisme. (PGRI, 2008)

Dimasa-masa itu, terjadi kerusuhan pada politik pendidikan di Indonesia. Bermula semakin banyaknya penyusupan PKI pada tubuh PGRI, kericuhan terjadi saat Kongres ke VIII PGRI di Bandung tahun 1956, saat itu pihak Soebandri ternyata menambah jumlah kartu suara (kartu palsu) yang digunakan supaya M.E. Subiadinata tidak terpilih menjadi ketua umum, diketahui Harmoeni Adi yang saat itu masih sebagai Wakil Ketua II PB PGRI, menjadi dalang pemalsuan kartu suara pemilihan tersebut, yang otomatis Harmoeni Adi dicopot dari jabatan dan pemilihan dilakukan ulang. Setelah Kongres ke VIII tersebut, jumlah anggota PKI semakin besar terutama di daerah Jawa Tengah dan juga di Jawa Timur. (Rusli Yunus, 2003b)

Berlanjut, pada Kongres IX di Surabaya, kelompok PKI berhasil memenangkan suara tentang dasar PGRI, yang awalnya berdasarkan Pancasila diganti dengan dasar Manipol (Manifestasi Politik) dengan pemungutan suara sebesar 60% menyatakan setuju dan 40% menyatakan tidak setuju. Manipol sendiri merupakan bentuk pertanggungjawaban Presiden atas dekrit yang dikeluarkan pada 5 Juli 1959 yang dijadikan sebagai haluan Negara Republik Indonesia. Lima poin inti sari dari Manipol/USDEK adalah Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, Kepribadian Bangsa Indonesia. (Lembaga Pendidikan Nasional., 1963).

Pada bulan Februari 1963 diadakan musyawarah di Jakarta oleh Lembaga Pendidikan Nasional yang merupakan lembaga bentukan PKI dan kawan-kawannya. Permasalahan ini membuat jelas status keanggotaan PGRI, mana yang memihak musyawarah penegasan Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional dan siapa yang memihak seminar pendidikan mengabdikan pada manipol. Musyawarah ini diikuti oleh 5 partai politik dengan 40 ormasnya sebagai tanggapan terhadap “seminar pendidikan mengabdikan parpol”.(Nursidik, 2019)

Suasana dalam tubuh PGRI semakin memanas apalagi ketika PB PGRI mengikutsertakan serta dalam musyawarah penegasan Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional yang diadakan pada 17 Juli 1963 di Jakarta. Kontra ideologi ini ditunjukkan secara terang-terangan oleh Moejono dan Ikhwan dengan mengundurkan diri dari PB PGRI, semenjak keikutsertaan PB PGRI pada Musyawarah Penegasan Pancasila sebagai dasar pendidikan nasional. Tak berselang lama Soebandri, Moejono dan Ikhwan membuat organisasi guru tandingan yang disebut PGRI-Nonvaksentral (yang artinya berdiri sendiri). Terdapat 2 istilah dalam tubuh PGRI, yakni PGRI Kongres (yang pro-revolusi, memperjuangkan pancasilais) dan PGRI-Nonvaksentral (yang pro-PKI, memperjuangkan “panca cinta” atau “panca tinggi” dalam panchadharma). Perbedaan itu semakin jelas ketika Kongres ke X PB PGRI di Jakarta pada November 1962.

Sejak terpecah menjadi PB PGRI Nonvaksentral, organisasi ini memperkokoh keberadaannya dengan cara mengumpulkan dukungan dari berbagai daerah yang pro terhadap PGRI Nonvaksentral, juga mencari dukungan pada para pejabat pemerintah, seperti Dr. Prijono selaku Menteri Departemen P&K. Pengaruh PKI semakin dirasa di lingkungan aparatur pendidikan, terutama di lingkungan P&K, mulai dari yang bertugas dalam perancangan anggaran pendidikan sampai pelaksanaan pendidikan di lapangan. Salah satu langkah yang diambil oleh PGRI Nonvaksentral pada politik pendidikan di Indonesia adalah mengubah dasar dan isi moral pendidikan nasional dari Pancasila menjadi “Panca Cinta” atau “Panca Tinggi”. Pidato inaugurasinya Dr. Busono Wiwoho pada rapat pertama majelis pendidikan nasional (Mapenas) dalam kedudukannya sebagai salah seorang wakil ketua, menyarankan agar pancawardhana diisi dengan moral “Panca Cinta”. Sistem pendidikan pancawardhana dilandasi dengan prinsip-prinsip: (1) perkembangan cinta bangsa dan cinta tanah air, moral nasional/internasional/keagamaan, (2) perkembangan kecerdasan, (3) perkembangan emosional-artistik atau rasa keharuan dan keindahan lahir batin, (4) perkembangan keprigelan atau kerajinan tangan, dan (5) perkembangan jasmani. Moral Panca Cinta meliputi: (1) cinta nusa dan bangsa, (2) cinta ilmu pengetahuan, (3) cinta kerja dan rakyat yang bekerja, (4) cinta perdamaian dan persahabatan antara bangsa-bangsa, (5) cinta orang tua. (Suara Guru, 1985)

Karena masih banyak anggota di P&K yang masih mendukung Pancasila, usul mengenai dasar pendidikan ini belum sampai mencapai kesepakatan. PKI lagi-lagi berulah, memengaruhi presiden dengan cara mengusulkan reorganisasi departemen P & K kepada presiden. Hal ini disetujui oleh Presiden Soekarno melalui Keputusan Presiden No. 187/1964 dan No. 188/1964 pada tanggal 4 Agustus 1964 tentang reorganisasi departemen P & K yang mengubah jumlah pembantu menteri P & K dari 3 menjadi 2 orang. Polemik berkepanjangan semakin meruncing di dalam lingkungan P&K, hingga berujung pemecatan 27 anggota dan 1 pengunduran diri di lingkungan P&K. 24 pejabat diantaranya ditampung oleh markas besar TNI Angkatan Darat diurus oleh Letkol Kolonel Amir Murtono, S.H. yang kelak menjadi Ketua Umum Golkar setelah terbentuk. Kemudian PGRI Kongres (Vaksentral) mencari perlindungan dan dukungan pada TNI yang juga anti PKI, dan bergabung dengan Sekretariat bersama Golongan Karya (Sekber GOLKAR) yang basis kekuatannya berasal dari militer TNI. (Nursidik, 2019)

Meletusnya peristiwa G 30 S PKI menjadi titik balik serangan PGRI Kongres terhadap PGRI Nonvaksentral. Rusli Yunus yang merupakan salah satu anggota PB PGRI kongres membentuk sebuah organisasi perjuangan guru untuk membantu KAMI menyingkirkan PKI di Indonesia. Dengan dalih keadilan. Pertama, Rusli Yunus membentuk organisasi masa KAGI (Kesatuan Aksi Guru Indonesia) dalam hal ini KAGI yang merupakan organisasi untuk melawan PKI, beranggotakan beranggotakan guru-guru dari organisasi Perserikatan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU), Ikatan Guru Muhammadiyah (IGM), Ikatan Guru PSII (Serikat Islam Indonesia), Ikatan Guru Marhaenis, Persatuan Guru Kristen Indonesia, Ikatan Guru Katolik, Persatuan Guru Indonesia, dan Persatuan Guru PERTI, melakukan gerakan sosial anti PKI, meruntuhkan kekuatan penyokong utama yang melindungi PGRI Nonvaksentral, yang kemudian KAGI bergabung menjadi Angkatan 66, dan mendesak Presiden Soekarno untuk segera melakukan tindakan terhadap tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa G 30 S PKI.

Presiden Soekarno memberikan surat mandat, yang biasa kita kenal Supersemar, kepada Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban (Pangkopkamtib). Soeharto justru menggunakan supersemar untuk legitimasi dalam pengambilan kepemimpinan negara dari tangan Soekarno. Salah satu hal yang dilakukan Soeharto adalah dengan mengeluarkan Keputusan Presiden No.1/3/1966 tentang pembubaran dan penumpasan PKI dari pusat hingga daerah beserta simpatisannya, membuat PGRI Nonvaksentral semakin terpojok. Adanya berita tentang diadakannya penangkapan-penangkapan oleh tentara terhadap anggota dan simpatisan PKI membuat para anggota PGRI Nonvaksentral semakin cemas. Hingga akhirnya pembunuhan massal para anggota PGRI Nonvaksentral. Pembunuhan terhadap PGRI Nonvaksentral sudah berpola dan terstruktur secara sistematis. Mengingat, Jawa Tengah dan Jawa Timur terdata paling banyak anggota PKI, Soeharto kemudian membentuk Resimen Para Komando Angkatan Darat (RPKAD) yang diketuai oleh Sarwo Edhi untuk melakukan pembersihan PGRI Nonvaksentral. RPKAD melakukan pembersihan para anggota PGRI Nonvaksentral di Jawa Tengah hingga ke Bali. Sementara di Jawa Timur, dilakukan oleh Batalyon Zeni Tempur 5/Arati Bhaya Wighina (Yon Zipur 5/ABW) dan dibantu organisasi pemuda GP Anshor (Nursidik, 2019) yang juga sama afiliasi dengan PERGUNU, yakni Nahdlatul Ulama'.

Kerusuhan yang mengakibatkan kekalahan dan terpojoknya PKI ini, menjadi catatan tersendiri bagi PKI, seolah boomerang dalam hati PKI yang kelak akan menjadi pengaruh pada keberadaan dan keselamatan PERGUNU, neven-neven NU dan seluruh banom maupun lembaga dalam naungan NU di masa era orde selanjutnya.

Rivalitas antara dua kubu ini, PKI dan NU memang sudah lama terjadi, salah satu hal yang dilakukan PKI pada NU, seperti mengadu domba bahwa NU adalah buatan Belanda. Yang tentunya membuat sakit hati anggota NU, hal itu di tepis oleh Idham Chalid selaku Ketua PBNU melalui surat kabar harian Duta Masyarakat. (Chalid, 1970)

B. Kelahiran dan Pemekaran PERGUNU di berbagai daerah 1952-1965

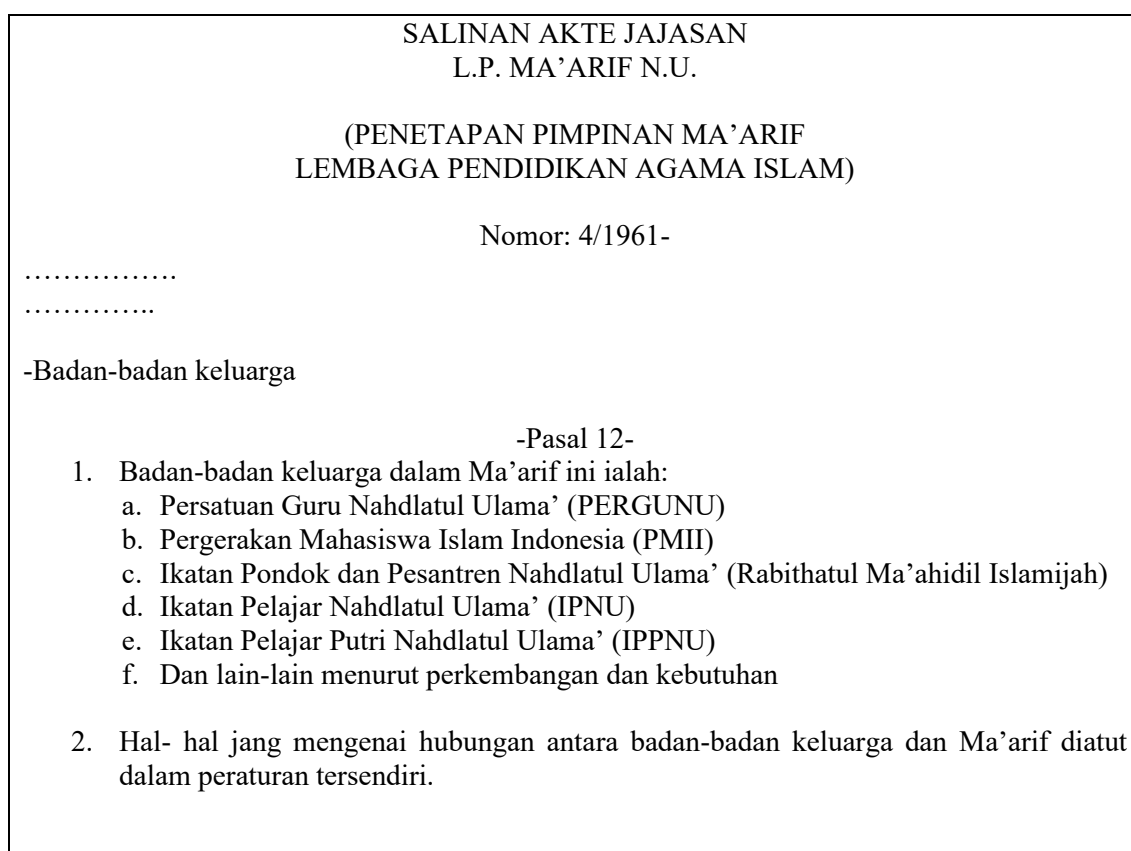
Perserikatan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) sendiri, mempunyai sejarah panjang sejak dirintis pada tahun 1952 sampai sekarang. Pada awalnya, organisasi ini dibentuk atas inisiatif para peserta Kongres Ma'arif se-Indonesia. Diantara keputusannya adalah memberikan mandat kepada Ma'arif Cabang Surabaya untuk menyiapkan pembentukannya. Pada tanggal 1 Mei 1958, Ma'arif Cabang Surabaya berhasil membentuk Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PERGUNU) Cabang Surabaya yang sekaligus sebagai kantor pusat organisasi tersebut yang berada di Jl. Babat Surabaya.

Setelah melalui proses yang cukup panjang, Pimpinan Pusat Persatuan Guru NU berhasil dibentuk pada 14 Februari 1959 memilih Ketua Umum Bashori Alwi. Kongres pertamanya diadakan pada 17-20 Oktober 1959 yang diikuti 27 cabang dan Bashori Alwi kembali terpilih sebagai ketua umum. (Alawi, 2019) Dan dihadiri oleh delegasi Pimpinan Wilayah (PW) maupun Pimpinan Cabang (PC) dari berbagai wilayah di Indonesia. Salah satunya pada muktamar tersebut dihadiri oleh beberapa tokoh dan delegasi, salah satunya, K.H. Baqir Marzuqi. (Ulama, 1959)

Posisi PERGUNU pada masa kepemimpinan awal tersebut, belum dapat dipastikan apakah sudah menjadi banom atau tidak. Menurut pada arsip NU, surat salinan akte

Jajasan LP Ma'arif NU tentang Penetapan Pimpinan Ma'arif Lembaga Pendidikan Agama Islam, menyebutkan bahwa PERGUNU merupakan bagian badan-badan keluarga. (Ulama, 1961)

Semangat dalam melebarkan sayap berfaham *Ahlussunnah Wal Jamaah*, visi dan misi itu terhembus hingga ke berbagai pelosok daerah di nusantara, terkhusus dalam ikatan neven NU, yakni, organisasi PERGUNU, yang anggota-anggotanya seorang guru, *asatidz* di pesantren, tokoh/penyiar agama, dosen dan lain sebagainya. PERGUNU mulai bermunculan, struktur di tingkat cabang hingga wilayah di berbagai daerah mulai terbentuk dan mendapatkan kelegalitasannya.



Gambar 1. Penetapan Pimpinan Ma'arif Lembaga Pendidikan Agama Islam (Sumber: Arsip Nasional Republik Indonesia. Inventaris Nahdlatul Ulama' 1948-1979. Jakarta. 2015. Nomor Inventaris 2825)

Mengingat apa yang telah digariskan oleh MANIPOL USDEK (yang saat itu diterapkan sebagai Dasar Pendidikan Nasional) bahwa agama merupakan unsur mutlak dalam pembangunan Watak dan Kepribadian yang luhur (*Character and Nation Building*) dan didasari akan rasa tanggungjawab atas kelancaran Pendidikan Agama pada sekolah-sekolah negeri maupun swasta, sesuai dengan M. P. R. S. No. II/1960. Hal itu disadari oleh Guru-guru Agama di Derah Tk. II Lampung Selatan, yang masa itu jumlah guru agama semakin banyak, diantaranya berafiliasi pada NU namun belum ada wadah organisasi yang menaunginya. Timbulah inisiatif di antara guru-guru agama baik swasta maupun negeri di Tanjung Karang-Lampung Selatan untuk mengorganisir dirinya

kedalam kesatuan organisasi. Maka pada Hari Ahad di Gedung S. M. P. N. 1 Tanjung Karang diselenggarakan rapat pembentukan PERGUNU untuk Cabang Tanjung Karang. Dalam rapat tersebut diambil beberapa keputusan diantaranya:

- “ 1. Dengan aklamasi ide pembentukan PERGUNU Tjabang Lampung Selatan dapat diterima.
 2. Menundjuk Sdr. A. Dachlan menjadi formatur untuk menjusun Pengurus sementara sesuai dengan mandate yang diberikan oleh Ketua L.P. Ma'arif Tjabang Lampung Selatan kepadanya.
 3. Setelah tersusun Pengurus tersebut segera menghubungi:
 - a) Pimpinan N.U. Tjabang Lampung Selatan.
 - b) Pimpinan L.P. Ma'arif Tjabang Lampung. Selatan.
- Untuk menjerahkan hasil2 rapat ini dan meminta advis/persetujuannya.”
(Ulama, 2015c)

Kemudian pada rapat kedua yang diselenggarakan pada hari Jum'at tanggal 18 September 1964 telah diterima Susunan Pengurus PERGUNU Cabang Tanjung Karang oleh formatur dengan beberapa perubahan, dalam rapat tersebut, disusun pula hak kerja kepada PERGUNU cabang Tanjung Karang- Lampung Selatan, hingga diadakannya konferensi.

Pada 21 September 1964, terbitlah Susunan Pengurus PERGUNU Lampung Selatan. Kepengurusan tersebut terbentuk dari; Dewan Penasehat oleh 1) Pimpinan N.U. Tjabang Lampung Selatan, 2) Pimpinan L.P. Ma'arif N.U. Lampung Selatan, 3) Ketua M.W.T.N.U. Tegineneng, 4) Bapak Imron Sumaidi, 5) Ibu Albertine. Dan pengurus, Ketua oleh A. Daclan Saleh, Wakil Ketua I oleh M. Machfuz, Wakil Ketua II oleh Abdullah, Sekretaris oleh Sapawi Nadis, Wakil Sekretaris oleh Djuruah, Bendahara oleh Mastar Iljas, Wakil Bendahara I oleh Napsiah Sukanta, dan pembantu oleh M. Tahir Baki, Sjaiquddin, Ubaidillah Kadir, M. Arsjad, Abdullah Rosjid. Diwaktu bersamaan juga PERGUNU Cabang Lampung Selatan, meminta PP PERGUNU untuk mengesahkan adanya PERGUNU di Daerah Tanjung Karang-Lampung Selatan, serta meminta bantuan untuk kelengkapan organisasi, misalnya, Anggaran Dasar, Stempel, dan lain sebagainya, untuk kelanjutan berjalannya organisasi.(Ulama, 2015c)

Namun, belum diketahui, apakah sudah disahkan atau belum oleh PP PERGUNU, sebab dua tahun kemudian, PERGUNU Cabang Tanjung Karang bergabung dengan Tanjung Betung untuk membentuk susunan PERGUNU baru, pengajuan rekomendasi pembentukan PERGUNU tersebut diajukan pada PP PERGUNU melalui surat No. 002/Tanf/A/VIII/1966. Disamping itu, Persatuan Guru Nahdlatul Ulama' (PERGUNU) Teluk Betung juga menegaskan telah melakukan reorganisasi pada 1 Januari 1966, pernyataan itu disampaikan melalui surat yang dibuat Azwan Djuni selaku Sekretaris I Tjabang Lampung Selatan dan juga ditandatangani oleh Abdullah selaku Ketua Tjabang Lampung Selatan, yang ditujukan kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama' (PBNU) Di Jakarta.(Ulama, 2015c)

Di masa orde lama, kebebasan berkumpul, bersuara, berorganisasi dan berpendapat amatlah dimungkinkan, Perkumpulan Persatuan Guru-guru Nahdhatul Ulama Cabang Lampung Selatan, di Tanjung Karang, misalnya, mereka menyuarakan aspirasinya mengenai beberapa hal kepada Kepala Kantor Inspeksi Pendidikan Agama Dati II Lampung Selatan di Teluk Betung pada 27 Djanuari 1965:

- “1.Mintak dengan sangat agar gadji mulai Bulan Januari 1965 dan seterusnya tidak lagi diadakan pemotongan.

2. *Mengharapkan kebidjaksanaan bapak agar gadji bulan Djanuari 1965 diusahakan agar dibayar sebulan hari aja mengingat Kantor Perbendaharaan Negara Dati I Lampung telah berada di Tandjungkarang.*
3. *Mintak agar gadji UGA th. 1963 jang baru diangkat mulai tgl.1-11-1964, tidak diadakan pemotongan sama sekali sebagai mana jang telah diranjanakan akan dipotong 2(dua) bulan gadji. Sebab mereka telah banjak mengeluarkan uang.*
4. *Mintak supaya idjazah U.G.A. th. 1961, 1962 & 1963 segera mendapat penjelesaian.*
5. *Mintak agar gadji berkala*
6. *Setiap mandate jang sudah diterima dimintak supaya segera di uang dan bagikan kepada guru-2 dan Pegawai jang berhaq.*
7. *Mintak supaya segala distribusi Pegawai pengurusan sepenuhnya sesuai dengan kantor2/ Djawatan2 lainja.-*
8. *Demi untuk nama baik Instansi Departemen Agama pada umumja, Direktorat Pendidikan Agama Chususnja diminta supaya Kepala Kantor Inspeksi dari Lampung Selatan dapat hadir tiap2 hari kerdja di kantor istimewa di waktu pembayaran gadji.- Djuga supaya gadji, rapel, honor, dsb, diterima oleh jang bersangkutan di kantor (bukan rumah), sehingga tidak merugikan dan menjulitkan para guru terutama jang dari luar kota.-*
9. *Untuk kelantjaran administrasi kantor, kami minta supaya penjelesaian tugas2 kantor di bebaskan/diserahkan kepada pegawai jang telah ditugaskan untuk itu, misalnya:soal keuangan/gadji supaya diurus oleh bagian keuangan.-*
10. *Mengingat banjaknya pegawai/guru2 Agama maka diharap supaya ada tim pembagian gadji diatur sedemikian rupa sehingga dapat lebih tjepat dan efesiensi.*
11. *Diminta agar sdra. Saifulhak/biturient P.G.A. A.N. Palembang jang sekarang diturunkan di Kantor I pada Lamp.Sel supaya ditagkan kembali mengadjar sesuai dengan besleidnja selaku guru Agama Putra. - (Tulisan sengaja menggunakan ejaan lama persisi dalam surat arsip)."*

(Ulama, 2015c)

Apa yang disampaikan oleh Pengurus Cabang Lampung tersebut, merupakan hasil rapat pada 26 Januari 1965 yang dihadiri oleh Pengurus Dati I Lampung.

Permasalahan mengenai pemotongan gaji guru di Indonesia masa 1960 an, sempat beredar isu, jika dimasa itu, uang negara sedang dialihkan untuk proyek Gelora Bung Karno dan Pembiayaan atlet-atlet Asian Games 1962, juga untuk Ganefo tahun 1963 ide Soekarno. Permasalahan Pemotongan Gaji Guru sering termuat di surat kabar harian Duta Masyarakat, dan perlu ditelusuri lagi.

Walaupun terletak di luar pulau, semangat masyarakat Tanjung Karang, dalam dunia pendidikan sangatlah terlihat. Terdapat beberapa bangunan sekolah dan pengadaan belajar mengajar untuk mencetak guru. Sebelum cikal bakal PERGUNU di Tanjung Karang tahun 1966. Di tahun 1957, UGM mengadakan Progam Pengerahan Tenaga Mahasiswa (PTM) di Tanjung Karang Lampung. Terlihat Para mahasiswa selaku guru PTM sedang bersama siswa SGA Tanjung Karang.(Khazanah Arsip UGM, n.d.)



Gambar 2. Mahasiswa UGM yang telah memberikan pengajaran (selaku guru Pengerahan Tenaga Mahasiswa) yang dikirim UGM ke Sekolah di Tanjung Karang. Mahasiswa UGM berfoto bersama siswa sekolah guru A di Tanjung Karang.

Pemekaran PERGUNU di daerah lainnya, terdapat berita dari Bk X Belitung, terbentuknya Cabang NU Komerling Ulu pada bulan Februari 1965. Yang terdiri dari K. H. Hasan Barlian sebagai Rois, K. Mjoed sebagai Wakil Rois, dan A. Rachman sebagai Katib Sjuritah. Terbentuknya Cabang baru tersebut, juga terbentuknya beberapa Badan Otonom di Tingkat Cabang Komerling Ulu, diantaranya, Muslimat, GP Anshor, Ma'arif, Pertanu, Lesbumi, IPPNU, IPNU, Fatayat, dan PERGUNU diketuai oleh Sjamsoelhadi. (Masjarakat., n.d.-b)

PERGUNU juga mengalami kondisi timbul tenggelam, keterorganisirannya. PP PERGUNU masa 1965, yang masih berkantor di Jl Pegirian 365-Babatan, Surabaya. Mendapatkan redaksi saran atau kritik dari PC PERGUNU Kebumen, Jawa Tengah pada 13 maret 1965. Surat tersebut berbunyi:

“Kami permaklumkan dengan hormat, bahwa sepanjang ingatan kami, semendjak didirikannya Organisasi “Persatuan Guru N.U. (PERGUNU)” ini baru sekali mengadakan Kongresnja.

Maka mengingat:

- a) *Perkembangan PERGUNU di daerah2 (Daerah Tk II)*
- b) *Pentingnja perjuangan dalam lapangan Perguruan dan Pendidikan.*
- c) *Peraturan Rumah Tangga fasal III ayat 1,*
- d) *Tidak adanja hubungan antara P.P. PERGUNU dengan Tjabang, ternjata:*
 1. *Dari Tjabang Kebumen beberapa kali mengirinkan surat ke P.P. PERGUNU, tapi tidak ada pernah djawaban,*
 2. *Laporan2 dari Tjabang PERGUNU sedaerah Djawa-Tengah dalam Konperensi kerdjanja jang diselenggarakan pada tgl.14-6-64' di Semarang. Oleh sebab hal tsb. Kami mendesak/minta dengan hormat lagi sangat kepada P.P PERGUNU agar segera mengadakan Kongresnja.*

Kemudian atas perhatianja terima kasih kami utjapkan.”
(Ulama, 2015a)

Pada 12 Mei 1965 telah dibentuk susunan Kepengurusan PERGUNU di Kraksaan. Permintaan Pengesahan dikirimkan kepada Pengurus PERGUNU Wilayah

Jawa Timur pada 23 Mei 1965. Ketua diduduki oleh 1) Muhammad Halil, 2) Sajid Umar Al-Hamid, 3) Mohammad Hafidz. Kemudian Sekretaris (Juru Tulis) oleh 1) Onggokusumo, 2) Muhammad Hasjim Syakir. Dan bendahara Moh. Zakiuddin. Dan Departemen Pendidikan oleh Moh. Sjahid, Departemen Penerangan oleh Moh. Saleh. (Ulama, 2015d)

Di Jawa Tengah, yang oleh Ryamizard Ryacudu (Menteri Pertahanan 2014-2019), sempat disebutkan sebagai daerah basis PKI ini, tak menyurutkan semangat warga NU, khususnya guru-guru dalam naungan NU untuk mengorganisir diri dalam satu wadah organisasi guru "PERGUNU", tepatnya di Kecamatan Parakan, Kabupaten Tumanggung, pada bulan Juni 1965, dalam rapat tersebut, dihadiri oleh para guru-guru agama, guru SD, guru agama, guru madrasah, jamaah pengajian, dan guru SMP. Terbentuknya PERGUNU Parakan, berfungsi sebagai coordinator dari Pimpinan Cabang Persatuan Guru Nahdlatul Ulama' Tumanggung. PERGUNU Parakan, dalam susunan kepengurusannya diketuai oleh Adnan dan sekretaris oleh Stabit Nur. (Masjarakat., 1965)

Selang beberapa hari, di Tjiputat (Ciputat), PERGUNU baru dibentuk pada bulan Juni tahun 1965, yang diketuai oleh Chumaidi, SJ, B. A., Sementara sekretaris diduduki oleh Kadir Hanafi, B. A., dan bendahara oleh Mahsun, B. A.. Peresmian terbentuknya PERGUNU, pada waktu bersamaan dengan terbentuknya IPNU Ranting PGA Islamijah Tjiputat. (Masjarakat., n.d.-a)

PERGUNU di Makassar cukup terbilang aktif beserta banom-banom lain di Makassar yang selalu memberikan ucapan kepada para stakeholder (Ulama, 2015e) seperti disebutkan dalam Tabel 1.

NU yang memiliki landasan dan prinsip yang kuat pada paham *Ahlussunnah Wal Jamaah*, dan mendukung pada pelaksanaan revolusi Indonesia. Tentunya selalu mengondisikan agar seluruh neven-neven nya atau lembaga yang berada dalam payung NU untuk setia pada NU dan menjaga semangat NKRI. Oknum-oknum rival, juga tak pelak, terkadang ada dalam tubuh Partai N.U. Tujuan dari oknum tersebut, mempengaruhi para anggota-anggota dibawahnya untuk tunduk pada kemauan dan tujuannya yang berlawanan dengan N.U.

Sebuah laporan datang dari Persatuan Guru Labuhan Batu, yang terdiri dari para guru- guru negeri maupun partikular, dalam laporannya, terdapat tindak tanduk dari Pimpinan Daerah Alwashlijah Lab. Batu yang bernama sdr. Domojeh, A. Rahim Dja'far, Sjahjunan Bakar dan Direktur PGAL. Alwashlijah Rantauprapat sdr. A. Kalim Junus, diketahui para petinggi-petinggi Lembaga Alwashlijah tersebut yang mendemonstrasikan anti "*Phobi*" terhadap partai NU, dengan melakukan ancaman-ancaman tak langsung pada guru guru di dalam Lembaga PGAL. Alwashlijah. Selain itu, menghalang-halangi para pelajar yang tergabung dengan PERGUNU dan IPNU-IPPNU tujuannya agar yang bersangkutan tidak turut aktif mensukseskan konferensi dari Partai N.U. di Rantauprapat tanggal 17- 19 September 1965.

Tak hanya itu, terdapat pemutar balikan pada nota-nota tertulis yang disampaikan pada guru guru yang tergabung dalam PERGUNU. Faktanya, Pimpinan Daerah Alwashlijah lah memerintahkan agar para guru guru turun ke bawah untuk mendaftarkan anggota-anggotanya pada batas waktu tertentu. Namun aktivitas guru guru sesuai mandat pimpinan tersebut di putar balikkan oleh mufattisj Daerah Alwaslijah, menuduh para guru guru tersebut lalai mengajar di Madrasah Alwashlijah.

Tabel 1. Ucapan-ucapan selamat pada instansi dan stakeholder di Makassar, oleh NU dan banom-banomnya (termasuk PERGUNU).

No.	Perihal	Waktu
1)	Soedjadi, atas kenaikan pangkatnya menjadi Kolonel Laut	Makassar, 18 Mei 1965
2)	Drs. Langkoke atas kenaikan pangkat DPRD Gotong Royong Dati II KOPRA Makassar.	Makassar, 13 Mei 1965
3)	Sdr. Hadji Andi Dewang menjabat Bupati Kepala Daerah Tk. II Pinrang.	
4)	Kapten M. DG Patompo, walikota kepala daerah Kota Pradja Makassar	Makassar, 10 Mei 1965
5)	Daud Nompo menjadi Pemimpin Akademi Pemerintahan dalam Negeri di Makassar	Makassar, 21 Maret 1965
6)	Bpk. Prof. Arnold Monomutu ucapan selamat telah berhasil memimpin UNHAS	Makassar, 1 Maret 1965
7)	Seluruh Karyawan H.R. Pedoman Rakjat berkenaan dengan Harlah ke 18 Harian Pedoman Rakjat	Makassar, 1 Maret 1965
8)	Hadji Djamaluddin Malik menjadi anggota DPR GR	Makassar 28 Februari 1965
9)	Dr. Natsir Said S.H. menjadi Rektor UNHAS	Makassar, 28 Februari 1965
10)	Presidium Panitia Konferensi P II ke VII, NU beserta banom-banomnya memberikan ucapan Selamat atas berakhirnya Konferensi	Makassar, 15 April 1965
11)	Drs. Daud Nompo, ucapan selamat atas pengangkatan sebagai Pimpinan Akademi Pemerintahan dalam negeri	Makassar, 21 Maret 1965
12)	Ligo Liputo atas gelar Drs. (Sardjana Olahraga)	Makassar, 17 April 1965
13)	Zainuddin Thoha ucapan selamat telah mendapatkan gelas sarjana di IKIP (Sastra Seni dan Bahasa)	Makassar, 22 Mei 1965
14)	P.T . Panglima Kodam XIV Hasanuddin. Ucapan usia sewindu kodam XIV pada 1 Djuni 1965	Makassar 1 Djuni 1965
15)	Teuku Azis, sebagai Deputi Menteri Pangak Indonesia Timur	Makassar 21 Djuli 1965
16)	Kol. Pelaut Maswidji, Pengangkatan Panglima Kodam V	Makassar, 21 Djuli 1965
17)	Imam Soepodjo, Panglima Angkatan Kepolisian Daerah XVII Sulsela	Makassar 21 Djuli 1965

Sumber : Arsip Nasional Republik Indonesia. Inventaris Nahdlatul Ulama'. Nomor Inventaris 222.

Guru-guru yang tergabung dalam PERGUNU pun juga mendapatkan perlakuan dan perkataan kasar pada aktivitas sehari-hari, dari para Pimpinan Daerah Alwashlijah. Dalam surat Pernyataan No. 1/PERGUNU/16/65 yang diterbitkan oleh Persatuan Guru-guru Nahdlatul Ulama' dikatakan antara lain:

“Mengingat :

1. Amanat-amanat P.J., PBR/Pahlawan Islam dan Kemerdekaan Bung Karno, yang inti pokoknya bahwa pelaksanaan revolusi RI dewasa ini, harus dengan opensif-revolusioner dan perlu menjengkirkan setiap orang yang plintat-plintut atau jang anti terhadap revolusi;
2. Bahwa partai-partai yang hidup di Indonesia benar-benar adalah alat revolusi dan madju pesatja kemandjuaan sesuatu partai berarti madju pesatnja pula pelaksanaan opensif revolusioner dan tidak boleh tidak bahwa setiap penentang

perkembangan partai berarti penentang pelaksanaan revolusi, artinya “contra-revolusi”:

3. *N. U. adalah satu dari partai agama yang terbesar dan pelaksanaan revolusi, pengembalian amanat penderitaan rakyat, dan dengan demikian tindakan-tindakan phobi terhadap N.U. berarti phobi terhadap revolusi;*
4. *Antek-antek Masjumi masih saja terus menerus menjelusup dalam tatanan organisasi Alwashlijah di Daerah Tk. II Lab. Batu diantaranya: sdr. Domojeh, A. Rahim Dja'far, Sjahjunan Bakar, sdr. A. Kalim Junus, dalam tindakan-tindakannya masih senantiasa didjawai oleh kereaksionerannya ex masjumi;*
5. *Selama antek-antek ex Masjumi dan orang-orang yang senantiasa bertindak setjara bermimpi terhadap terlahirnya kemabli Masjumi seperti yang disebutkan diatas, masih saja mengkangkangi Alwashlijah, maka tidak boleh tidak Alwashlijah itupun akan menjadi organisasi contra revolusi.”*

(Ulama, 2015b)

Dalam surat pernyataan itu juga para Guru Persatuan Nahdlatul Ulama' menuntut agar Pemerintah Daerah TK. II Lab. Batu segera mengambil tindakan terhadap Pimpinan Alwashlijah TK. II Lab. Batu yang “*phobi*” atau anti terhadap N.U. (para pimpinan tersebut berfaham Masjumi) dan kontra-revolusi. Serta agar jabatan mereka sebagai Pegawai Negeri juga di *retool* atau dipecat.

Selain itu juga, mendesak agar Pemerintah Daerah Tk. II Lab. Batu Pantja Tunggal dan KOSEKHAN turun tangan untuk menertibkan, kecerobohan-kecerobohan dalam organisasi Alwashlijah Lab. Batu dan membersihkan dari tokoh-tokoh Masjumi. Apabila Alwashlijah tidak segera merubah cara berpikirnya dan membersihkan dirinya dari ex Masjumi dan contra-revolusi, maka menuntut pemerintah membubarkan Alwashlijah Daerah Labuhan Batu dan juga menyatakannya sebagai organisasi terlarang di Lab. Batu.

Dan meminta agar Pemerintah Daerah Tk. II Lab. Batu cq Pantja Tunggal segera turun tangan untuk menyelamatkan guru-guru dan pelajar-pelajar PGAI. Alwashlijah khususnya dan madrasah-madrasah Alwashlijah umumnya di Lab. Batu dari Tindakan-tindakan peracunan jiwa oleh Pimpinan Daerah Alwashlijah, khususnya dari saudara sdr. Domojeh, A. Rahim Dja'far, Sjahjunan Bakar dan Direktur PGAL. Alwashlijah Rantaprapat sdr. A. Kalim Junus, yang memiliki “*phobia*” atau keantian dengan N. U. dan revolusi serta mempengaruhi dengan ajaran-ajaran reaksioner ala Masjumi nya.

Kemudian, meminta agar Pemerintah Daerah Tk. II Lab. Batu cq Pantja Tunggal Lab. Batu untuk turun tangan menyelamatkan guru-guru Alwasjilah yang tergabung dalam ‘PERGUNU’ yang sedang diancam dengan persebaran-persebaran dari Alwashlijah dengan alasan-alasan yang pada hakekatnya adalah karena ‘PERGUNU’ Lab. Batu. Surat itu ditutup dengan note “Tingkatkan pelaksanaan opsip – revolusioner dengan menjingkirkan sikap oknum2 contra revolusi” (tulisan sengaja ditulis persis menggunkan ejaan masa lampau.

Ditulis pada 27 September 1965, surat tersebut ditulis oleh Hasbi Jasin, ditujukan kepada Pantja Tunggal Lab. Batu di Rantau Prapat. Serta tembusan pada PJM. Presiden RI di Djakarta, JM. Para WPM I-III di Djakarta, Jm. Para Kenko wk. Ketum MPRS di Djakarta, Jm. Para Menko wk. Ketua DPRGR di Djakarta, Jm. Menko Agama RI di Djakarta, Jm. Menteri PD&K di Djakarta, Jm. PB-NU di Djakarta, Direktorat Pendidikan Agama di Djakarta, dan lain sebagainya.(Ulama, 2015b)

Persoalan urgent bagi Alwashlijah Lab. Batu ini, berlangsung hingga beberapa tahun. Kemudian pada tahun 1973, barulah ada pengangkatan kepala sekolah baru. PBNU Mengetahui hal tersebut, berdasarkan Surat dari Cabang Labuhan Batu tanggal 16 Maret 1973 No. 01/LNM/NU/73 yang PBNU membalas melalui Surat no. 1222/ Tanf/ C/ IV/73, memberikan motivasi untuk penggiatan kembali bidang Pendidikan/Ma'arif. Pertama-tama yang disampaikan dalam surat tersebut, sebuah apresiasi atas pengangkatan Kepala Sekolah baru saudara Machbuddin Noor, di PGANU Rantauprapat Lab. Batu. Kegembiraan PBNU sebab sejalan dengan garis baru perjuangan NU di bidang-bidang non politik, dan melihat Cabang Labuhan Batu mulai melangkahkan kegiatan-kegiatannya yang positif yang akan melandasi masa depan perjuangan NU di Lab. Batu.

Disamping itu, PBNU juga menyampaikan, tengah membentuk suatu tim khusus di pusat, yang bertugas menyusun working-paper mengenai kegiatan-kegiatan NU dalam menanggapi perkembangan zaman yang terlalu cepat, agar NU dapat mengejar ketertinggalan selama ini di Bidang Da'wah, Pendidikan, Soasial dan Ekonomi.

KESIMPULAN

Ada beberapa faktor yang memengaruhi berdirinya PERGUNU, karena banyaknya anggota NU yang berkecimpung di dunia pendidikan formal maupun non formal, maka perlu adanya banom dalam NU sendiri untuk mewedahi. Di lain sisi, merupakan bentuk kekecewaan dari situasi keberadaan PGRI (organisasi guru tertua di Indonesia) yang terpecah, tidak stabil karena perbedaan ideologi. Apalagi di masa orde lama kebebasan berkumpul dan berserikat merupakan kebebasan tanpa penghalang. Pemekaran PERGUNU di berbagai daerah maupun pelosok begitu pesat.

Di tahun 1965, situasi Politik di Indonesia mengalami ketidakstabilan, hal tersebut juga berpengaruh terhadap kondisi ideologi pendidikan dan para stakeholder politik dan pendidikan. Tentunya berpengaruh pada keberadaan organisasi-organisasi guru yang ada di Indonesia. Yang berujung organisasi guru terlibat dalam aksi 1965, PERGUNU bersama organisasi guru lain, IGM (Ikatan Guru Muhammadiyah), Ikatan Guru PSSI (Serikat Islam Indonesia), Ikatan Guru Maharneis, Persatuan Guru Kristen Indonesia, Ikatan Guru Katolik, Persatuan Guru Indonesia, dan Persatuan Guru Perti bergabung dalam KAGI(Kesatuan Aksi Guru Indonesia) sementara itu, beberapa guru lainnya memilih menepi. Sehingga keberadaan organisasi guru di Indonesia di masa itu terbengkalai. Namun imbas dari peristiwa 65 tidak membuat PERGUNU redup. Di tahun tersebut PERGUNU ada, timbul tenggelam, dan masih terorganisir melaksanakan program kerja serta konsolidasi pemekaran PERGUNU di daerah-daerah dan mengesahkan pengurus baru di daerah-daerah.

PERGUNU merekah di berbagai daerah dan pelosok luar pulau. Membayangkan dimasa Tahun 50-60 an, fasilitas akomodasi ditahun tersebut amatlah terbatas, namun PERGUNU mampu bertahan. Jalur komunikasi atau koordinasi kepusat dimasa itu hanya menggunakan telepati surat pos yang proses pengiriman hingga bulanan. Semangat dan kesetiaan dari para anggota itulah yang membuat para anggota di daerah bersabar untuk menunggu balasan dan arahan dari pusat.

PERGUNU yang lahir, pada Kongres Ma'arif di Surabaya, masa orde lama, hidup kurang lebih selama 20 tahun, dimasa itu telah mampu melakukan konsolidasi ke daerah luar pulau dan pelosok. Cabang PERGUNU tersebar di seluruh Nusantara. Jarak, waktu, dan materi tidak menjadi penghalang. Hal ini menunjukkan betapa besar peran tokoh - tokoh PERGUNU dan NU dalam menyebarkan paham *Ahlu Sunnah Wal Jama'ah* dan mewadahi kebutuhan guru serta mendorong kesejahteraan guru. Apabila mengaca dari eksistensi PERGUNU masa tersebut, maka sudah seharusnya PERGUNU masa reformasi terus berkonsolidasi ke berbagai penjuru. Namun, tidak hanya berfokus pada kuantitas massa, juga perlu menjaga kualitas dalam mengorganisir Banom PERGUNU, menjunjung guru dan terus bersatu, bersama memperjuangkan kesejahteraan guru, keadilan dan kualitas pendidikan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis sangat berterimakasih kepada seluruh staf layanan di Arsip Nasional Republik Indonesia yang telah melayani pencarian data PERGUNU dengan baik. Tentunya pada Kerjasama dalam tim ini. Tak lupa Bapak Dr. Agus Suwignyo, M.A., Bpk. Riyadi Pramudita dan Bpk. Rojil sebagai pembimbing dalam penulisan tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Chalid, I. (1970). *Duta Masyarakat 1970*.
- Hadiatmadja, R.A. Soepardi, dkk. (2000). *Pendidikan sejarah perjuangan PGRI (PSPPGRI), Jilid II, III, IV, V*. IKIP SEMARANG.
- Khazanah Arsip UGM. (n.d.). *PENYERAHAN TENAGA MAHASISWA DI TANJUNG KARANG LAMPUNG TAHUN 1959*. Khazanah Arsip UGM.
- Lembaga Pendidikan Nasional. (1963). *Seminar Pendidikan Mengabdikan Manipol*. (L. P. Nasional (ed.); p. 13). Lembaga Pendidikan Nasional.
- Masyarakat., D. (n.d.-a). IPNU & PERGUNU TJIPUTAT. In *Duta Masyarakat* (15 Juni 19). Duta Masyarakat.
- Masyarakat., D. (n.d.-b). *NU Tjombang Komereng Ulu*. Duta Masyarakat.
- Masyarakat., D. (1965). *PERGUNU PARAKAN* (5 Juni 196). Duta Masyarakat.
- Nursidik, B. (2019). PGRI KONGRES MELAWAN PGRI NONVAKSENTRAL TAHUN 1962-1967. *Journal.Student.Uny*, 5(5).
<https://journal.student.uny.ac.id/index.php/ilmu-sejarah/article/view/16572/0>
- PGRI. (2008). *Buku Sejarah Perjuangan Jatidiri PGRI*. PGRI YPLP.
- Rusli Yunus, M. (2003a). *Perjalanan PGRI (1945-2003) Menyongsong Kongres XIX PGRI di Semarang, 8-12 Juli 2003*. PB PGRI.
- Rusli Yunus, M. (2003b). *PGRI dari masa ke masa*. PGRI YPLP.
- Suara Guru. (1985). No Title. In *Suara Guru no.11*.
- Ulama, N. (1959). Surat Delegasi Kongres PERGUNU. In *Arsip Nasional Republik Indonesia*. Arsip Nasional Republik Indonesia.

- Ulama, N. (1961). SALINAN AKTE JAJASAN L.P MA'ARIF. In *Arsip Nasional Republik Indonesia*. Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Ulama, N. (2015a). Inventaris Nahdlatul Ulama' 1948-1979. In *Arsip Nasional Republik Indonesia (1948th–1979th ed.)*. Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Ulama, N. (2015b). *Inventaris Nahdlatul Ulama' 1948-1979*. (1948th-1979. ed.). Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Ulama, N. (2015c). Inventaris Nahdlatul Ulama' 1948-1979. In *Arsip Nasional Republik Indonesia*. Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Ulama, N. (2015d). Inventaris Nahdlatul Ulama' 1948-1979. In *Arsip Nasional Republik Indonesia*. (1948th–1979th ed.). Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Ulama, N. (2015e). Inventaris Nahdlatul Ulama". In *Arsip Nasional Republik Indonesia*. Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Chalid, I. (1970). *Duta Masyarakat 1970*.
- Hadiatmadja, R.A. Soepardi, dkk. (2000). *Pendidikan sejarah perjuangan PGRI (PSPGRI), Jilid II, III, IV, V*. IKIP SEMARANG.
- Khazanah Arsip UGM. (n.d.). *PENYERAHAN TENAGA MAHASISWA DI TANJUNG KARANG LAMPUNG TAHUN 1959*. Khazanah Arsip UGM.
- Lembaga Pendidikan Nasional. (1963). *Seminar Pendidikan Mengabdikan Manipol*. (L. P. Nasional (ed.); p. 13). Lembaga Pendidikan Nasional.
- Masyarakat., D. (n.d.-a). IPNU & PERGUNU TJIPUTAT. In *Duta Masyarakat* (15 Juni 19). Duta Masyarakat.
- Masyarakat., D. (n.d.-b). *NU Tjabung Komering Ulu*. Duta Masyarakat.
- Masyarakat., D. (1965). *PERGUNU PARAKAN* (5 Juni 196). Duta Masyarakat.
- Nursidik, B. (2019). PGRI KONGRES MELAWAN PGRI NONVAKSENTRAL TAHUN 1962-1967. *Journal.Student.Uny*, 5(5).
<https://journal.student.uny.ac.id/index.php/ilmu-sejarah/article/view/16572/0>
- PGRI. (2008). *Buku Sejarah Perjuangan Jatidiri PGRI*. PGRI YPLP.
- Rusli Yunus, M. (2003a). *Perjalanan PGRI (1945-2003) Menyongsong Kongres XIX PGRI di Semarang, 8-12 Juli 2003*. PB PGRI.
- Rusli Yunus, M. (2003b). *PGRI dari masa ke masa*. PGRI YPLP.
- Suara Guru. (1985). No Title. In *Suara Guru no.11*.
- Ulama, N. (1959). Surat Delegasi Kongres PERGUNU. In *Arsip Nasional Republik Indonesia*. Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Ulama, N. (1961). SALINAN AKTE JAJASAN L.P MA'ARIF. In *Arsip Nasional Republik Indonesia*. Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Ulama, N. (2015a). Inventaris Nahdlatul Ulama' 1948-1979. In *Arsip Nasional Republik Indonesia (1948th–1979th ed.)*. Arsip Nasional Republik Indonesia.
- Ulama, N. (2015b). *Inventaris Nahdlatul Ulama' 1948-1979*. (1948th-1979. ed.). Arsip

Nasional Republik Indonesia.

Ulama, N. (2015c). Inventaris Nahdlatul Ulama' 1948-1979. In *Arsip Nasional Republik Indonesia*. Arsip Nasional Republik Indonesia.

Ulama, N. (2015d). Inventaris Nahdlatul Ulama' 1948-1979. In *Arsip Nasional Republik Indonesia*. (1948th–1979th ed.). Arsip Nasional Republik Indonesia.

Ulama, N. (2015e). Inventaris Nahdlatul Ulama". In *Arsip Nasional Republik Indonesia*. Arsip Nasional Republik Indonesia.